

**KARTU NOMOR  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO**

NOMOR PERBUP : 23 TAHUN 2024

TANGGAL PERBUP : 03-07-2024

JUDUL PERBUP : Perubahan Ketiga Atas Peraturan  
Bupati Purworejo Nomor 134  
Tahun 2021 Tentang Rencana  
Strategis Dinas Penanaman  
Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Purworejo  
Tahun 2021-2026

DINAS/OPD : BAPPEDALITBANG

TGL PENGUNDANGAN : 03-07-2024

BERITA DAERAH TAHUN 2024 NO 23 SERI E NO 22



BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 64), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 74 tentang Perubahan Kedua (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 60).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

BERISI HAL-HAL YANG AKAN DIUBAH DALAM PERUBAHAN KETIGA

Tabel 6.1 T-C 27 BAB VI dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 134 Seri E Nomor 64) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

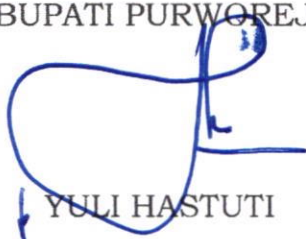
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 03 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO



YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 03 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024 NOMOR 23 SERI E NOMOR 22

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 134 TAHUN 2021  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

**BAB VI  
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**Tabel 6.1  
 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Purworejo**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
		UR	B/	P/	D/	C/				R/	D/	2020		2022		2023		2024		2025				2026		
												Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			Target	Pagu (Rp.)	Target
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Peningatan Kualitas Pelayanan Publik							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks			88		88		88		88		3.708.719.992	88		88				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks			88		88		88		88		88		88		88			
		2	18	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	341.681.500	100,00	375.849.650	100,00	2.996.313.580	100,00	2.666.719.992	100,00	2.680.674.004	100	8.607.881.926			
		2	18	1		201	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			7	14.500.000	7	15.980.000	7	23.897.500	7	26.287.250	7	28.915.975	35	109.550.725			
							<b>Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			
		2	18	1		201	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			16	5.250.000	16	5.775.000							32	11.025.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
		2	18	1		201	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen								16	6.352.500	16	6.987.750	16	7.686.525	48	21.026.775	DPMPTSP	Kab.Purworejo
		2	18	1		201	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1	1.500.000	1	1.650.000							2	3.150.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
		2	18	1		201	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen								1	1.815.000	1	1.996.500	1	2.196.150	3	6.007.650	DPMPTSP	Kab.Purworejo
		2	18	1		201	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1	1.500.000	1	1.650.000							2	3.150.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
		2	18	1		201	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen								1	1.815.000	1	1.996.500	1	2.196.150	3	6.007.650	DPMPTSP	Kab.Purworejo
		2	18	1		201	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1	2.000.000	1	2.200.000							2	4.200.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
		2	18	1		201	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen								1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200	3	8.010.200	DPMPTSP	Kab.Purworejo
		2	18	1		201	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1	2.000.000	1	2.200.000							2	4.200.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
		2	18	1		201	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen								1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200	3	8.010.200	DPMPTSP	Kab.Purworejo



		2	18	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit							0	-	DPMPTSP	Kab.Purworejo								
		2	18	1	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit							1	400.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo								
		2	18	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			905	2.000.000.000				905	2.000.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo							
		2	18	1	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit								0	-	DPMPTSP	Kab.Purworejo							
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>208</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>			<b>3</b>	<b>72.214.500</b>	<b>3</b>	<b>79.435.950</b>	<b>3</b>	<b>87.379.545</b>	<b>3</b>	<b>96.117.500</b>	<b>3</b>	<b>105.729.249</b>	<b>3</b>	<b>440.876.744</b>				
								<b>Hasil : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
		2	18	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1	23.484.500	1	25.832.950			2	49.317.450	DPMPTSP	Kab.Purworejo						
		2	18	1	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan							1	28.416.245	1	31.257.870	1	34.383.656	3	94.057.771	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
		2	18	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			1	30.500.000	1	33.550.000			2	64.050.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo						
		2	18	1	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							1	36.905.000	1	40.595.500	1	44.655.050	3	122.155.550	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
		2	18	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			1	18.230.000	1	20.053.000			2	38.283.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo						
		2	18	1	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan							1	22.058.300	1	24.264.130	1	26.690.543	3	73.012.973	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>209</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Jenis</b>			<b>2</b>	<b>61.194.600</b>	<b>2</b>	<b>67.314.060</b>	<b>2</b>	<b>74.045.466</b>	<b>4</b>	<b>81.450.013</b>	<b>4</b>	<b>89.595.014</b>	<b>5</b>	<b>320.242.352</b>				
								<b>Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
		2	18	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			8	35.786.600	8	39.365.260			16	75.151.860	DPMPTSP	Kab.Purworejo						
		2	18	1	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit							8	43.301.786	8	47.631.965	8	52.395.161	24	143.328.912	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
		2	18	1	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit							1	50.000.000*	1	50.000.000*	2	100.000.000*	DPMPTSP	Kab.Purworejo				
		2	18	1	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							1	50.000.000*	1	50.000.000*	2	100.000.000*	DPMPTSP	Kab.Purworejo				
		2	18	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			80	25.408.000	80	27.948.800			-	-	DPMPTSP	Kab.Purworejo						
		2	18	1	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							80	30.743.680	80	33.818.048	80	37.199.853	240	101.761.581	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
<b>Peningkatan Nilai</b>								<b>Persentase Peningkatan Nilai Investasi</b>	<b>%</b>			<b>1,92</b>	<b>74,46</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			
	<b>Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal</b>							<b>Realisasi Penanaman Modal</b>	<b>Milliar</b>			<b>73,00</b>	<b>45,79</b>	<b>67,65</b>	<b>74,41</b>	<b>81,85</b>	<b>90,00</b>	<b>99,00</b>	<b>413</b>								
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PERANAMAN MODAL</b>	<b>Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal</b>	<b>%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>195.000.000</b>	<b>5</b>	<b>141.000.000</b>	<b>5</b>	<b>154.000.000</b>	<b>5</b>	<b>159.000.000</b>	<b>5</b>	<b>158.000.000</b>	<b>5</b>	<b>807.000.000</b>		



	2	18	2	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen		1	195.000.000	1	100.000.000	1	109.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	526.000.000			
							Hasil : Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen																
	2	18	2	201	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		1	195.000.000	1	100.000.000							2	295.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	2	201	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen						1	109.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	209.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	2	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Keluaran : Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen			-	1	41.000.000	1	45.000.000	1	89.000.000	1	88.000.000	4	263.000.000			
							Hasil : Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten																	
	2	18	2	202	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen														DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	2	202	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen							1	59.000.000	1	58.000.000	2	117.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
	2	18	2	202	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang ulmah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen				1	41.000.000							1	41.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	2	202	0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen						1	45.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	105.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan</b>	%	99,84	100,00	99,5	183.000.000	99,5	132.000.000	99,5	145.000.000	99,5	149.000.000	99,5	148.000.000	100	757.000.000		
	2	18	3	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%			99,5	183.000.000	99,5	132.000.000	99,5	145.000.000	99,5	149.000.000	99,5	148.000.000	100	370.100.000		
							Hasil : Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal																	
	2	18	3	201	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		1	100.000.000	1	66.000.000							2	166.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	3	201	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen						1	72.600.000	1	74.500.000	1	74.000.000	3	221.100.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	3	201	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	83.000.000	1	66.000.000							2	149.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	3	201	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen																
	2	18	3	201	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen						1	72.400.000	1	74.500.000	1	74.000.000	3	220.900.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
	2	18	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria</b>	%	100,00	100,00	100,00	380.000.000	100,00	274.000.000	100,00	301.000.000	100,00	309.000.000	100,00	308.000.000	100	1.572.000.000		
	2	18	4	201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu PINTU dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	%			100,00	380.000.000	100,00	274.000.000	100,00	301.000.000	100,00	309.000.000	100,00	308.000.000	100	1.572.000.000		
							Hasil : Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan																	

			2	18	4	201	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha							2500	200.000.000	2500	68.500.000						5000	268.500.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo				
			2	18	4	201	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha												2500	75.250.000	2500	77.250.000	2500	77.000.000	7500	229.500.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
			2	18	4	201	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha								20	100.000.000	25	68.500.000							45	168.500.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
			2	18	4	201	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha												30	75.250.000	35	77.250.000	40	77.000.000	105	229.500.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
			2	18	4	201	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang								20	40.000.000	25	68.500.000							45	108.500.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo		
			2	18	4	201	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha													30	75.250.000	35	77.250.000	40	77.000.000	105	229.500.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
			2	18	4	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha									30	40.000.000	35	68.500.000							65	108.500.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
			2	18	4	201	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen													1	75.250.000	1	77.250.000	1	77.000.000	3	229.500.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
			2	18	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK</b>	%	100,00	100,00	100,00	100,00	402.000.000	100,00	290.000.000	100,00	318.000.000	100,00	327.000.000	100,00	326.000.000	100	1.663.000.000								
			2	18	5	201		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Keluaran : Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan</b>	%			100,00	402.000.000	100,00	290.000.000	100,00	318.000.000	100,00	327.000.000	100,00	326.000.000,00	100	1.663.000.000									
									<b>Hasil : Terpenuhinya Ketentuan Perizinan Berusaha</b>																								
			2	18	5	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha								249	268.000.000	249	250.000.000								498	518.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
			2	18	05	201	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha													7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	21	150.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
			2	18	5	201	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha													249	162.000.000	249	168.000.000	249	166.000.000	747	496.000.000	DPMPTSP	Kab.Purworejo	
			2	18	5	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha									8	134.000.000	8	40.000.000										DPMPTSP	Kab.Purworejo

2	18	5	201	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha						8	106.000.000	8	109.000.000	8	110.000.000	24	325.000.000	DPMP/TSP	Kab.Purworejo		
2	18	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan</b>	%	100,00	100,00	100,00	120.000.000	100,00	87.000.000	100,00	95.000.000	100,00	98.000.000	100,00	97.000.000	100	497.000.000			
2	18	6	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Dokumen			1	120.000.000		1	87.000.000	1	95.000.000	1	98.000.000	1	97.000.000	1	497.000.000		
						<b>Hasil : Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</b>																		
2	18	6	201	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen			4	120.000.000		4	87.000.000						8	207.000.000	DPMP/TSP	Kab.Purworejo	
2	18	6	201	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen							4	95.000.000	4	98.000.000	4	97.000.000	8	290.000.000	DPMP/TSP	Kab.Purworejo	

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI